

## **Kebijakan Pemerintahan Negeri Dalam Penggunaan Alokasi Dana PNPM Mandiri Di Negeri Telutih Baru Kecamatan Tehoru**

**Moh. Daud Marasabessy<sup>1</sup>, Rukiah Latuconsina<sup>2</sup>**

*Universitas Darussalam Ambon, Ambon, Indonesia<sup>1</sup>*

*Universitas Darussalam Ambon, Ambon, Indonesia<sup>2</sup>*

e-mail : [aufarmarsy001@gmail.com](mailto:aufarmarsy001@gmail.com)<sup>1</sup>, [kia@unidar.ac.id](mailto:kia@unidar.ac.id)<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penggunaan dana alokasi PNPM Mandiri, dan faktor apa saja yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan penggunaan dana alokasi PNPM Mandiri di Desa Telutih Baru Kecamatan Tehoru. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1). Pedoman Wawancara, 2). Wawancara Mendalam (Wawancara Independen) 3). Observasi dan 4). Studi Perpustakaan. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah model analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa orang miskin seringkali menjadi kelompok yang tidak berdaya, baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Pendamping sosial kemudian muncul sebagai agen perubahan yang terlibat dalam membantu memecahkan masalah yang mereka hadapi. Bantuan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara masyarakat miskin dan pekerja sosial untuk bersama-sama menghadapi berbagai tantangan seperti merancang program untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi, memobilisasi sumber daya lokal, memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses pemenuhan kebutuhan, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri merupakan program nasional yang berupa kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem dan mekanisme program serta prosedur, pemberian bantuan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong inisiatif dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** *Pemberdayaan, Monitoring, Evaluasi, PNPM*

## PENDAHULUAN

Prinsip pelayanan publik harus dilaksanakan oleh jenjang pemerintahan yang sedekat mungkin kepada rakyat. Itu berarti pemerintah desa adalah sebagai ujung tombak pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat karena pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat.

Desa berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah "kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Ini mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat.).

Pembangunan di wilayah pedesaan tentunya tidak akan terlepas dari pelibatan

masyarakat dan *stakeholders* yang terlibat. Pentingnya pelibatan masyarakat dalam sebuah proses pembangunan di pedesaan dapat menjadi faktor keberhasilan program tersebut. Partisipasi adalah proses aktif inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Partisipasi tersebut dapat dikategorikan: pertama, warga komunitas dilibatkan dalam tindakan yang telah dipikirkan atau dirancang oleh orang lain dan dikontrol oleh orang lain. Kedua, partisipasi merupakan proses pembentukan kekuatan untuk keluar dari masalah mereka sendiri. Titik tolak partisipasi adalah memutuskan, bertindak, kemudian mereka merefleksikan tindakan tersebut pada subjek yang sadar.

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM-Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Partisipasi ini akan terwujud dalam kegiatan nyata apabila ada kemampuan, kemauan dan kesempatan. Kemampuan dan kemauan masyarakat dalam berpartisipasi dalam sebuah program tertentu berasal dari dalam diri masyarakat sendiri, artinya meskipun ada kesempatan yang diberikan oleh pemerintah atau negara untuk membangun infrastruktur tetapi jika tidak ada kemampuan dan kemauan dari masyarakat maka partisipasi tidak akan terwujud. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat

terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki hidupnya.

Tujuan PNPM adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pemerintah dalam bersinergi dengan masyarakat untuk mengefektifkan program-program pembangunan pedesaan yang sesuai dengan kearifan lokal yang ada.

Secara umum, PNPM Mandiri merupakan program yang memiliki prinsip *bottom up*, di mana kegiatan tersebut bertumpu pada masyarakat dan membutuhkan partisipasi masyarakat. Tujuan peminjaman bergulir untuk kelompok swadaya masyarakat adalah pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dan penyelenggaraan pembangunan desa dan antar-desa, serta peningkatan penyediaan modal secara ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang

infrastruktur desa, pengelolaan pinjaman bergulir bagi kelompok swadaya masyarakat, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Dalam lingkup PNPM-Mandiri, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Kebiakan

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas di pergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan pemerintahan serta perilaku Negara pada umumnya, atau sering kali di berikan makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan dari; Carl Freidrich yang mendefinisikan kebijakan sebagai serangkain tindakan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentudengan menunjukkan hambatan—hambatan dan kesempatan.

James E Andreson mendefinisikan kebijakan adalah serangkain tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang di ikuti dan di laksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok guna memecahkan.

### 2. Pengertian Partisipasi

Menurut Cohen dan Uphoff seperti yang dikutip oleh Girsang (2011), menjelaskan pengertian partisipasi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi. Cohen dan Uphoff juga membagi partisipasi ke dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat.
- b. Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan

menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek.

- c. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran.
- d. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.

### 3. Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata “*Power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial, karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal (Suharto 2010):

- a. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
- b. Bahwa kekuasaan dapat diperluas.

Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Menurut Somodiningrat (1999) pemberdayaan masyarakat memerlukan kepedulian yang diwujudkan dalam kemitraan dan kebersamaan pihak yang sudah maju dengan pihak yang belum berkembang. Dalam hal ini pemberdayaan merupakan suatu proses perubahan ketergantungan menjadi kemandirian. Somodiningrat (1999) juga menjelaskan bahwa segenap program pemberdayaan masyarakat yang dirancang untuk menanggulangi ketertinggalan merupakan bagian dari upaya mempercepat proses perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih tertinggal. Dengan demikian keterkaitan antar program pemberdayaan masyarakat mencakup keterkaitan misi, tujuan, dan pendekatan lintas sektor. Proses perubahan itu hanya dapat lestari dan berkelanjutan jika mampu digerakkan oleh masyarakat. Aparat dan pihak luar adalah fasilitator yang melakukan campur tangan minimum jika masyarakat belum mampu melakukan proses tersebut.

### 4. Prinsip Pemberdayaan

Mardikanto (2010) mengemukakan bahwa pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip:

- a. Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.
- b. Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat. Sebab, perasaan senang/puas atau tidak-senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/pemberdayaan di masa-masa mendatang.
- c. Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Sebab, setiap orang cenderung untuk mengaitkan / menghubungkan kegiatannya

dengan kegiatan / peristiwa lainnya.

dibaca dan dipahami.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif dilakukan melalui pengisian kuesioner. Pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat menjawab bagaimana Kebijakan Pemerintahan Negeri Telutih Baru dalam Pengelolaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri di Kecamatan Tehoru, khususnya program pembangunan fisik. Teknik wawancara mendalam terhadap informan yang pada penelitian ini akan menyoroti anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), tim pendamping/fasilitator PNPM dan aparat pemerintah. Pada penelitian ini yang menjadi informen kunci dalam program PNPM di Negeri Telutih Baru adalah anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengikuti program pinjaman bergulir di Desa Negeri Telutih Baru Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah.

### **2. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Teknik pengumpulan yang digunakan adalah sebagai berikut: 1). Observasi, Observasi adalah cara pengumpulan data yang di lakukan melalui pengamatan secara langsung di lapangan di mana suatu keadaan, atau situasi benar-benar terjadi. 2). Wawancara, Wawancara di lakukan secara bebas oleh peneliti di lapangan terhadap objek. 3). Dokumentasi' Sebuah cara yang di lakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pengambilan sumber-sumber informasi. Dari data yang dikumpulkan diolah menggunakan analisis deskriptif kualitatif, data-data yang diperoleh melalui instrumen yang digunakan sehingga mudah

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Desa/Negeri**

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai kini, masih belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya.

Berikut hasil wawancara bersama bapak Farid Samalehu selaku sebagai Pejabat Negeri Telutih Baru pada tanggal 6 juli 2021 mengatakan bahwa:

*“Pada pembangunan PNPM Mandiri DTK.pelaku PNPM Mandiri DTK terdiri atas konsultan, pemerintah daerah, dan pihak-pihak perorangan kelompok yang peduli terhadap upayah membangun daerah tertinggal sehingga dapat berkembang sebagaimana daerah lain yang sudah maju”.*

Dari hasil wawancara di atas maka bertujuan untuk karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak, maka jurang pemisah antara kota dan desa akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian.

Adapun sasaran pokok pembangunan pedesaan adalah terciptanya kondisi ekonomi rakyat di pedesaan yang kukuh, dan mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Sasaran pembangunan pedesaan tersebut diupayakan secara bertahap dengan langkah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas tenaga kerja di pedesaan.
- b. Peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa atau Negeri.
- c. Penguatan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat desa.
- d. Pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa.
- e. Pengembangan sarana dan prasarana pedesaan

dan

- f. Pemantapan keterpaduan pembangunan desa berwawasan lingkungan.

## **2. Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Di Negeri Telutih Baru Kecamatan Tehoru.**

Pemerintah pusat telah melaksanakan kegiatan penanggulangan dampak krisis ekonomi, seperti program IDT, P3DT, JPS, P2MPD dan PPK (Program Pengembangan Kecamatan) sebagai cikal bakal PNPM Mandiri. Pelaksanaan PNPM Mandiri berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini di dukung dengan pembiayaan yang berasal dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dan pinjaman dari Bank Dunia.

Hasil wawancara bersama Elias Tehuayo selaku Sekertaris Desa Telutih Baru pada tanggal 8 juli 2021 mengatakan bahwa:

*“Melalui program PNPM Mandiri dengan tujuan untuk penanggulangan kemiskinan dengan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional kesejahteraan sosial bagi masyarakat. PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan program pembangunan infrastruktur social ekonomi”.*

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan untuk Seluruh proses kegiatan PNPM Mandiri pada hakekatnya memiliki dua dimensi, yaitu :

- a. Memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan dan mengambil

keputusan secara terbuka dan penuh tanggung jawab,

- b. Menyediakan dukungan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri (Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri, 2007 : 1).

Salah satu perhatian dari PNPM Mandiri adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan di sini mencakup aspek yang cukup luas salah satunya adalah di bidang ekonomi, karena masalah ekonomi merupakan suatu masalah yang sifatnya makro dan mikro yang di gunakan sebagai barometer atau tolak ukur untuk mengetahui tingkat kemakmuran dan kesejahteraan perekonomian nasional terutama saat-saat krisis seperti sekarang ini (Kompas, 2 Januari 2009 : 13).

Hasil wawancara bersama Hardi Kaim selaku Bendahara PNPM Mandiri pada tanggal 12 juli 2021 mengatakan bahwa:

*“Saya tertarik untuk mengikuti PNPM Mandiri di Negeri Telutih Baru merupakan salah satu desa di Kecamatan Tehoru yang melaksanakan PNPM Mandiri”.*

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang di laksanakan antara lain pembangunan infrastruktur/sarana dan prasarana untuk kegiatan perekonomian masyarakat serta kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP), dengan dana fisik mencapai Rp 500.000.000.

## **3. Pengawasan**

Hasil wawancara bersama Bapak Abdul Syukur Kohilay selaku sebagai Ketua KPMN pada tanggal 10 juli 2021 mengatakan bahwa.

*“Berdasarkan acuan strategi komunikasi di atas, maka focus strategi komunikasi PNPM Mandiri adalah sosialisasi PNPM Mandiri yang bertujauan :Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat bahwa PNPM Mandiri merupakan program untuk membangun daerah tertinggal dan khusus dan berusaha memandirikan masyarakat miskinsehingga bsa keluar dari lingkaran*

*kemiskinan melalui program dari masyarakat”.*

Hasil wawancara bersama Bapak Azis Kelihu selaku sebagai Sekertaris PNPM Mandiri mengatakan bahwa.

*“mengenai partisipasi politik PNPM Mandiri di Negeri Telutih Baru Kecamatan Tehoru sangat baik, namun kami mengharapkan di setiap kegiatan PNPM Mandiri yang baik dari pihak pemerintah agar ke depan masyarakat lebih meningkatkan partisipasi dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri”.*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perlu adanya sosialisasi yang baik pemerintah dalam kegiatan PNPM Mandiri agar masyarakat senantiasa dapat berpartisipasi dengan baik dalam setiap kegiatan yang berlangsung di dalam Negeri Telutih Baru.

#### **4. Monitoring**

Hasil wawancara bersama Bapak Rusman Walalayo selaku Tim Monitori

*“Pelaksanaan meliputi persiapan manfaat kegiatan Persiapan pelaksanaan adalah kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi pihak-pihak yang terlibat agar terdapat kesamaan pikiran dan program PNPM Mandiri”*

Dari hasil wawancara tersebut penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat telah memberikan pengaruh pada mereka untuk menentukan apakah mereka ikut dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri yang seharusnya mereka dapatkan ketika mereka sudah berkorban waktu dan tenaga untuk melaksanakan program PNPM Mandiri.

Partisipasi Mengenai PNPM Mandiri Di Negeri Telutih Baru

Ditengah-tengah persaingan yang cukup ketat di bidang industri perusahaan di tuntut untuk meningkatkan laba sebesar-

besarnya dengan biaya yang serendah-rendahnya. Dalam hal ini berarti perusahaan di tuntut untuk dapat bekerja seefisien mungkin. Efisiensi merupakan tolak ukur yang di gunakan untuk berbagai kegiatan.

Kemudian dalam penjelasan teori produksi ekonomi mikro klasik juga di perkenalkan efisiensi teknik dan efisiensi ekonomi. Efisiensi teknik adalah besaran yang menunjukkan perbandingan antara produksi sebenarnya dengan produksi minimum. Rasionalitas Masyarakat dalam partisipasi penggunaan PNPM Mandiri.

- 1) Memperluas kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja baru
- 2) Dampak signifikan terhadap kenaikan belanja rumah tangga pedesaan Selanjutnya, semakin lama sebuah sebuah Desa menerima bantuan program, maka semakin besar dampaknya terhadap peningkatan belanja rumah tangga pedesaan.
- 3) Sasaran program yang berpihak pada orang miskin.
- 4) Berdasarkan berbagai studi, dampak sosial dan ekonomi, PNPM Mandiri Pedesaan terbukti sukses dalam menentukan sasaran dan memberikan bantuan kepada Desa termiskin di Indonesia, dengan sasaran kelompok masyarakat miskin.
- 5) Meningkatkan kapasitas, kinerja lokal dan kelembagaan, pembentukan model perencanaan dan pembiayaan partisipatif.

#### **KESIMPULAN**

Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Pendamping sosial kemudian hadir sebagai agen perubah yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka. Pendampingan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti merancang

program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, memobilisasi sumber daya setempat, memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat.

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Selain itu juga PNPM Mandiri adalah salah satu kebijakan yang secara nyata dan jelas dibentuk dan formulasikan untuk membangun potensi masyarakat dan daerahnya guna proses pembangunan yang berkesinambungan. Satu hal yang harus diperhatikan disini terutama dalam tujuan jangka pendek dari PNPM Mandiri itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, N. (2007). Transparansi dan Akuntabilitas publik melalui e-government. *Malang: Bayumedia Publishing*.
- Andrianto, W. (2007). Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi & Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Bandung: Mandar Maju*.
- Arikunto, S. (2010). Metode penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Dr, P. Sugiono (2008)., Metode Penelitian

- Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *CV. Alfabeta, Bandung*, 25.
- Echols, J. M. (1997). Dictionary of Law.
- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2012). Metodologi penelitian kualitatif. *Jogjakarta: Ar-Ruzz Media*, 61, 177-181.
- Kartiwa, A. (2020). Good local governance: membangun birokrasi pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 10(4), 1-16.
- King, D., & Stoker, G. (1996). *Rethinking local democracy*. Macmillan International Higher Education.
- Krina, L. L., & Lalolo, L. (2003). Indikator dan Alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. *Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Kumorotomo, W. (2005). *Akuntabilitas birokrasi publik: sketsa pada masa transisi*. MAP UGM & Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo, O., & Daerah, M. K. (2002). Yogyakarta.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2017). *Law & society in transition*. Routledge.
- Raba, M. (2006). *Akuntabilitas konsep dan Implementasi* (Vol. 1). UMMPress.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah